

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional pada umumnya telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, seiring dengan kemajuan di bidang kesejahteraan sosial yang dicapai dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, disadari pula bahwa keberhasilan Propinsi Jawa Tengah ternyata masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang belum terselesaikan. Propinsi Jawa Tengah masih tetap dihadapkan pada permasalahan Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana dan Tindak Kekerasan, baik masalah yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dan pemeliharaan suasana keamanan yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat, maka perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya “Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera” sebagaimana dimaksud di dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2008 – 2013. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial saja, melainkan juga untuk memaksimalkan peran aktif dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang “Kesejahteraan Sosial”, penyelenggaraan kesejahteraan sosial membutuhkan peran aktif masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud meliputi berbagai program dan kegiatan yang menggunakan pendekatan berbasis kelembagaan maupun yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh unsur-unsur yaitu Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, serta 52 Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial.

Kantor Dinas Sosial berada di Jalan Pahlawan yang merupakan kawasan bangunan perkantoran dan letaknya cukup strategis. Namun, perencanaan pembangunan gedung yang tidak terpadu membuat penataan massa dan pengolahan tapak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tidak efisien. Bangunan kantor yang ada terpisah dalam dua massa bangunan. Terpisahnya kantor tersebut tentu mempengaruhi efisiensi kerja dan kecepatan arus informasi dalam instansi tersebut. Sebagai kantor sebuah dinas yang memiliki ruang lingkup kerja setingkat provinsi seharusnya dapat menjadi fasilitas kerja yang memberikan kenyamanan bagi seluruh karyawannya dan dapat menjamin efisiensi kerja dalam instansi tersebut. Keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan dalam pelayanan dinas kepada masyarakat. Selain itu perencanaan bangunan gedung ini terkesan sendiri-sendiri, secara

arsitektural tampilan massa bangunan satu dengan lainnya terlihat kurang kompak dan harmonis, dengan jarak antar bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kawasan Jalan Pahlawan sendiri direncanakan berkembang sebagai kawasan perkantoran, sehingga peruntukan lahan sebagai Kantor Dinas Sosial Jawa Tengah sudah tepat.

Melihat kondisi kantor Dinas Sosial Jawa Tengah seperti yang diuraikan, maka perlu perencanaan sebuah desain kantor yang dapat memberikan kenyamanan bagi para penggunanya dan suasana kerja yang efisien, serta fleksibel dalam pengaturan ruang. Perlu direncanakan sebuah kantor yang memiliki kapasitas yang dapat menampung seluruh aktivitas di dalam kantor tersebut dan memiliki tampilan bangunan yang lebih baik, yang dapat diwujudkan melalui perancangan baru gedung Kantor Dinas Sosial Jawa Tengah.

Selain itu, bangunan kantor yang akan didesain nantinya diharapkan dapat mencerminkan sebuah kantor yang terus berkembang dan sesuai dengan lingkungan sekitarnya yang berkarakter modern. Bangunan kantor yang baru juga harus dapat menciptakan kenyamanan bagi pengguna bangunan sekaligus dapat menggunakan energi secara efisien sesuai dengan iklim di mana tapak bangunan tersebut berada. Oleh karena itu, dalam perancangan bangunan ini perlu memperhatikan iklim tropis yang diwujudkan dalam respon bangunan terhadap iklim tropis melalui bentuk bangunan, material, susunan ruang dan lain-lain yang disesuaikan dengan kondisi dan bentuk tapak.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembahasan adalah mengadakan penyusunan dan analisa data untuk menjadi landasan dan program dasar perencanaan dan perancangan dalam perencanaan dan perancangan Kantor Dinas Sosial Jawa Tengah untuk membentuk citra bangunan kantor pemerintahan. Sasaran pembahasan adalah untuk mendapatkan program ruang serta konsep perencanaan dan perancangan arsitektur dalam Kantor Dinas Sosial Jawa Tengah.

1.3. MANFAAT

Manfaat dari penyusunan LP3A ini adalah sebagai landasan yang digunakan untuk penyusunan Desain Grafis Arsitektur (DGA) sebagai tahapan Tugas Akhir yang harus dipenuhi dan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai jenjang Strata-1 (S1) di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

1.4. RUANG LINGKUP

Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan bangunan Kantor ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung masalah utama.

1.5. METODOLOGI PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan, memaparkan, kompilasi dan menganalisa data sehingga diperoleh suatu pendekatan program perencanaan dan perancangan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan program dan konsep dasar perencanaan dan perancangan. Adapun Metode yang dipakai dalam penyusunan penulisan ini antara lain :

1. **Metode deskriptif**, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : studi pustaka/studi literatur, data dari instansi

terkait, wawancara dengan narasumber, observasi lapangan serta *browsing* internet.

- 2. Metode dokumentatif**, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto yang di hasilkan.

Dari data - data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisa untuk memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur bangunan Kantor Pemerintahan.

1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum dan penjelasan secara garis besar tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, sistematika pembahasan serta alur pikir dalam menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang substansi data-data tentang Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berupa data tentang sejarah organisasi, visi misi, susunan organisasi, eksisting dari kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, aktivitas pengguna Kantor, Fasilitas dan Ruang Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

BAB III PROGRAMING

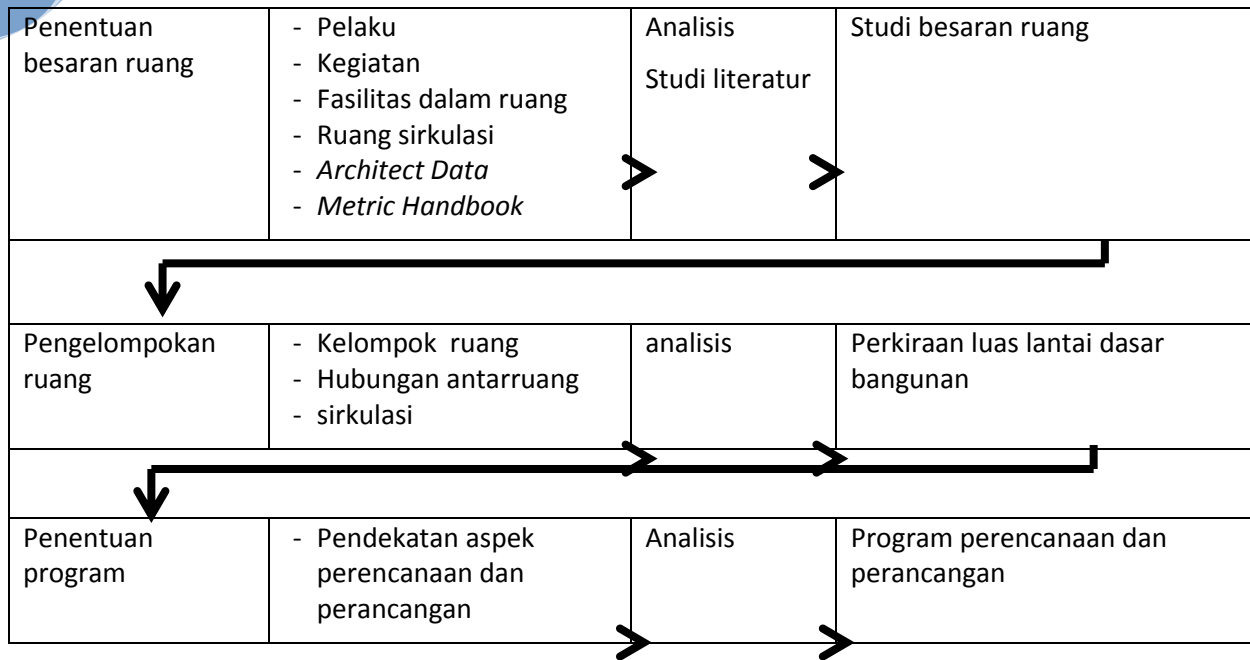
Membahas tentang besaran ruang yang diperlukan untuk mendesain Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berdasarkan studi kegiatan yang dilakukan dan pengguna dalam ruang-ruang di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tersebut mengacu pada standar-standar yang berlaku untuk perencanaan dan perancangan bangunan kantor.

BAB IV PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Membahas tentang pendekatan program perencanaan dan perancangan kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan program perencanaan meliputi pendekatan fungsional dan kontekstual. Sedangkan pendekatan program perancangan meliputi pendekatan visual arsitektur, teknis, dan kinerja.

1.7. ALUR PIKIR

Tahapan	Bahan dan Alat	Metode	Output
Identifikasi Masalah	Fenomena : Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah merupakan bangunan pemerintahan	Studi literatur	Problematika : Ruang-ruang pendukung kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Penentuan Metode	Permasalahan yang ada	analisis	Metode : bahan, alat dan cara
Struktur Organisasi Dinas Sosial, Penentuan pengguna	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2009 - Perda Jateng No. 6 tahun 2008 - Pergub Jateng No. 64 tahun 2008 	Studi literatur	Pegawai kantor, PMKS, dan ormas-ormas yang berhubungan dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Penentuan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2009 - Perda Jateng No. 6 tahun 2008 - Pergub Jateng No. 50 tahun 2008 - Pergub Jateng No. 64 tahun 2008 - Observasi ke objek yang telah ada 	Studi literatur Observasi lapangan	Kegiatan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Fungsi, Tata Kerja dan Tugas Pokok Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Penentuan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pergub Jateng No. 64 tahun 2008 - Pelaku - Kegiatan - Observasi ke objek yang telah ada - <i>Metric Handbook</i> 	Studi literatur Observasi lapangan	Fasilitas dan jenis ruang
Penentuan kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Metric handbook</i> - <i>Architect Data</i> 	Studi literatur Analisis	Kapasitas ruang



Gambar 1.1. Diagram Alur Pikir

Sumber: Pemikiran penulis, 2013